

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu hal penting yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa adalah pembangunan. Pengaruh globalisasi yang melanda seluruh negeri menuntut untuk menjadikan kondisi pembangunan suatu bangsa harus menjadi efektif, efisien, dan kompetitif. Pembangunan merupakan suatu orientasi dalam kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan memiliki tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat suatu bangsa serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup, dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan (Mardikanto, 2015: 4).

Pada Negara berkembang salah satu yang menjadi prioritas utama dalam melaksanakan kegiatan negaranya adalah pembangunan nasional, begitu halnya dengan bangsa Indonesia. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pemerintah adalah rangkaian pembangunan yang berkesinambungan secara menyeluruh, terpadu terarah, dan bertahap yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat, serta berusaha untuk memacu peningkatan kemampuan dalam meningkatkan kehidupan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Pembangunan Nasional memang tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan. Pemberdayaan mestinya mendorong pembangunan nasional

menuju kearah yang baik untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan pembangunan nasional.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. Bina usaha menjadi suatu upaya penting dalam setiap pemberdayaan sehingga dapat memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan ekonomi (Mardikanto, 2015: 27)

Negara Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar pula. Oleh karena itu pembangunan diberbagai sektor kehidupan masyarakat harus dikuatkan untuk mendorong kemajuan dan kesejahteraan. Untuk mencapai keberhasilan, pembangunan dititik beratkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama bagi pembangunan pada bidang yang lainnya.

Salah satu hal yang diperhatikan dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah di bidang ekonomi. Pada era otonomi daerah saat ini, mewujudkan pembangunan nasional pada bidang ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam membangun potensi daerahnya. Diperlukan berbagai upaya yang lebih inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Salah satu yang menjadi potensi untuk mendorong kemajuan perekonomian di tiap daerah adalah keberadaan Usaha Kecil Menengah (UKM). Diakui, bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di Negara-negara

sedang berkembang, tetapi juga di Negara-negara maju. Di Negara maju UKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, seperti halnya di Negara yang sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar (BPS 2011).

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2011, Perkembangan UMKM sepanjang tahun 2011 terbukti mampu berkontribusi dalam pembentukan PDB sebesar 57,60%. Perinciannya sebagai berikut, sebanyak 32,02% oleh Usaha Mikro, sejumlah 10,99% oleh Usaha Kecil, dan sejumlah 14,59% oleh Usaha Menengah. Nilai rata-rata pembentukan PDB oleh UMKM Rp 24,8 juta per unit usaha. UMKM juga melakukan investasi baru selama 2011, yang nilainya mencapai Rp 13,8 triliun, atau 49,11% dari total investasi baru di 2011. Penambahan investasi baru terbesar datang dari Usaha Menengah yaitu sebesar Rp 12,7 triliun, atau setara 92% dari total investasi baru UMKM. UMKM mampu merekrut tenaga kerja baru sebanyak 2,32 juta orang, atau setara dengan 97,8% dari lapangan kerja baru yang diciptakan UMKM dan usaha besar di tahun 2011. Penyerapan tenaga kerja baru banyak dilakukan oleh Usaha Mikro, jumlahnya 1,94 juta orang, termasuk mempekerjakan dirinya sendiri. Usaha Kecil mampu menyerap tenaga kerja baru sebanyak 292.000 orang.

Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan UKM yang kuat maka struktur ekonomi menjadi kokoh, yang berperan besar dalam Perekonomian Indonesia akan memiliki fundamental yang kuat jika ekonomi kerakyatan menjadi pelaku utama yang produktif dan berdaya saing tinggi. Salah satu faktor pembangunan ekonomi kerakyatan yang memegang peranan penting dan strategis adalah pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengembangan UKM dilakukan secara terus menerus dengan selalu memperhatikan aspek pendidikan permodalan, produktivitas, sarana/prasarana, pemasaran serta pemanfaatan

lembaga pemerintah dan swasta secara maksimal, untuk mewujudkan UKM modern dan berdaya saing.

Pemberdayaan UKM secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional untuk perbaikan kesejahteraan rakyat.

Selain mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan UKM diarahkan pada upaya meningkatkan produktivitas dan daya saingnya, serta secara sistematis diarahkan pada upaya menumbuhkan wirausaha baru disektor-sektor yang memiliki produktivitas tinggi yang berbasis pengetahuan, teknologi dan sumber daya lokal (Gie Kian, K, 2003).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Menengah memberikan landasan hukum yang kuat untuk tumbuh kembangnya usaha kecil menengah. Penciptaan iklim yang kondusif dilakukan, akses permodalan diperbanyak dan dipermudah, pendidikan kewirausahawan dan keterampilan diperluas, mendorong dan mempermudah usaha kecil dan menengah dalam bermitra usaha serta menjual hasil produksinya.

Malang adalah kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya dan merupakan kota pendidikan serta pariwisata yang memungkinkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan maju. Keberadaan perguruan tinggi yang begitu banyak tentunya menjadi modal baik bagi pemerintah Kota Malang untuk bekerjasama dalam melakukan pembinaan usaha-usaha kecil untuk mendukung perkembangan perekonomian masyarakat di Kota Malang.

Disamping itu keberadaan sektor pariwisata di Kota Malang juga berdampak besar terhadap perkembangan usaha-usah kecil seperti usaha kuliner dan lain sebagainya yang tersebar dimana-mana. Apabila dikelola secara lebih profesional keberadaan usaha kecil itu tentu sangat menguntungkan bagi kemajuan perekonomian masyarakat. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan memberdayakan usaha-usaha kecil agar berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian daerah.

Keberadaan Usaha Kecil Menengah di Kota Malang tidak lari jauh dari persoalan-persoalan mendasar yang menyebabkan menghambatnya proses tumbuh kembang usaha. Masalah itu antara lain adalah masih kurangnya perhatian dari pemerintah, buktinya usaha-usaha kecil seperti kuliner tersebar dimana-mana sehingga memunculkan kesan kekumuhan. Penyebaran usaha-usaha kecil seperti kuliner yang tidak teratur juga berdampak negatif terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat misalnya mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan serta mengganggu ketertiban dan keamanan.

Disisi lain permasalahan UKM di Kota Malang berkaitan dengan permodalan, pemasaran, pengelolaan yang kurang profesional. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan yang dimiliki UKM. Hal ini tentunya menghambat proses tumbuh kembangnya UKM yang semestinya dapat mengubah perekonomian masyarakat.

Terpilihnya Kota Malang pada tahun 2016 sebagai tuan rumah konferensi kota kreatif Indonesia merupakan sebuah harapan besar agar kota Malang menjadi

barometer perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Malang mestinya memberikan perhatian khusus terhadap apa pengembangan Usaha Kecil Menengah yang mampu mendorong penguatan perekonomian masyarakat Kota Malang.

Melihat permasalahan yang dihadapi UKM tersebut, dibutuhkan peran dari pemerintah daerah Kota Malang yang berkewajiban untuk turut serta menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemberdayaan UKM. Sehubungan dengan itu Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Koperasi dan UKM memiliki program pemberdayaan UKM yang tertuang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018 dengan melaksanakan program pemberdayaan dan pengembangan Industri, Skala Mikro Kecil dan Menengah dan Koperasi.

Sehubungan dengan itu untuk mengetahui lebih jelas tentang usaha pemerintah Kota Malang dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka hal ini adalah sesuatu yang penting untuk dikaji. Dari uraian tersebut diatas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang pemberdayaan UKM di Kota Malang dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul; “UPAYA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA MALANG DALAM MEMBERDAYAKAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)”

## B. Perumusan Masalah

Untuk melihat dan mengkaji permasalahan yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka dirumuskan apakah yang dimaksud dengan masalah, sehingga nantinya akan memberikan kejelasan pada permasalahan yang akan dibahas maka dalam hal ini permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah (UKM)?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap kegiatan bentuk apapun didalamnya pasti mengandung suatu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan hal yang penting dan harus diketahui oleh peneliti yang hendak melakukan suatu kegiatan tertentu karena tujuan yang ingin dicapai itu akan memberikan arahan terhadap kegiatan yang telah dilakukannya. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang dalam memberdayakan Usaha Kecil Menengah.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat proses pemberdayaan Usaha Kecil Menengah.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Akademis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, dalam memberdayakan masyarakat serta memperkaya hasil penelitian tentang Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. Kalangan Akademis, untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Publik yang diperoleh selama studi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah daerah khususnya dinas terkait dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM)
- b. Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori-teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Usaha Kecil Menengah (UKM), dan juga mengembangkannya dibidang lainnya.